

PRAKTIK PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI PONDOK PESANTREN DAR AL-TAUHID CIREBON

❖ Budi Manfaat
Dosen IAIN Syekh Nurjati
Cirebon

ABSTRAK

Keragaman etnik, bahasa serta budaya, merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan. Dalam peradaban modern bahkan bisa dikatakan tidak ada lagi wilayah di globus ini yang hanya di huni oleh satu etnik tertentu atau budaya tertentu. Hampir semua wilayah merupakan percampuran dari pelbagai etnik dan budaya. Dalam konteks kehidupan sosial di tengah keragaman, karakter multikultural mutlak diperlukan. Yaitu sebuah karakter yang mampu mengenal, menerima, menghargai dan merayakan keragaman kultur. Penelitian ini mengkaji tentang Arjawinangun, sebuah wilayah kecil di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang telah sejak lama dihuni oleh beragam etnik, budaya, dan agama. Pesantren Dar al-Tauhid dalam hal ini dijadikan sebagai pusat perhatian kajian, sebuah pesantren tua yang dewasa ini dikenal sebagai pesantren yang berhasil mengusung nilai-nilai multikultural dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: *Pendidikan, Multikultural, Pesantren.*

A. Latar Belakang Masalah

Keragaman etnik, bahasa serta budaya, merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan. Dalam peradaban modern bahkan bisa dikatakan tidak ada lagi wilayah di globus ini yang hanya di huni oleh satu etnik tertentu atau budaya tertentu. Hampir semua wilayah merupakan percampuran dari pelbagai etnik dan budaya¹. Dalam konteks kehidupan sosial di tengah keragaman, karakter multikultural mutlak diperlukan. Yaitu sebuah karakter yang mampu mengenal, menerima, menghargai dan merayakan keragaman kultur.

Arjawinangun, adalah salah satu contoh sebuah wilayah kecil di sebuah Kabupaten Cirebon Jawa Barat, yang telah sejak lama dihuni oleh beragam etnik, budaya, dan agama. Pesantren Dar al-Tauhid, sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang telah lama berdiri di tengah-tengahnya, di akui mempunyai peran besar dalam menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis.

Di tengah isu-isu konflik antar etnis, budaya, dan agama yang terjadi di berbagai daerah di belahan Indonesia yang terjadi silih berganti, Arjawinangun terbukti masih tetap dalam suasana kehidupan harmonisnya. Kenyataan ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian, untuk mengungkap rahasia keberhasilan tersebut.

Urgensi pendidikan karakter% dalam hal ini secara khusus yang dimaksudkan adalah karakter multikultural, dewasa ini kian gencar disuarakan oleh banyak kalangan, utamanya oleh kalangan pendidik. Para pakar pendidikan bersepakat untuk menggagas pentingnya pendidikan multikultural pada tahun 2000, melalui sebuah simposium², workshop³, serta berbagai tulisan⁴ di media

¹ M. Nurkholis Setiawan dalam bukunya yang berjudul "PRIBUMISASI ALQURAN: Tafsir Berwawasan Ke-Indonesiaan" (Kaukaba: 2012) hlm 115.

² Pada tahun 2000, Jurnal Antropologi Indonesia, Departemen Antropologi, Universitas Indonesia, mengadakan simposium Internaasional di Makasar dengan mengungkap isu-isu yang berkaitan dengan multikulturalisme. Isu-isu yang dimaksud meliputi: demokrasi, hak-hak asasi manusia, kewarganegaraan, pendidikan, nasionalisme, konflik sosial, problem identitas dan etnisitas, hubungan kekuasaan dengan respon lokal terhadap keragaman, dan lain-lain. Simposium serupa diselenggarakan pada 2001 dan 2002 dengan mengambil tempat di Padang dan Denpasar. Lihat buku

masa dan buku. H.A.R Tilaar, Zamroni, Azyumardi Azra, Musa Asy'ari, Abdul Munir Mulkhani, M. Amin Abdullah, dan Abdurrahman Mas'ud adalah diantara pakar pendidikan Indonesia yang mewacanakan pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia.

Sementara itu, pendidikan Islam baik sebagai lembaga maupun sebagai materi, secara umum, oleh para pengamat pendidikan Islam di Indonesia dikritik karena telah mempraktikkan proses pendidikan yang eksklusif, dogmatik, dan kurang menyentuh aspek moralitas. Proses pendidikan seperti ini terjadi di lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, sekolah Islam, dan pesantren. Indikatornya, menurut M. Amin Abdullah, terlihat pada proses pendidikan dan pengajaran agama pada umumnya yang lebih menekankan sisi keselamatan individu dan kelompoknya sendiri dari pada keselamatan yang dimiliki dan didambakan oleh orang lain di luar diri dan kelompoknya sendiri⁵. Adapun menurut Mulkhani, indikatornya terlihat pada: (1) terbatasnya ruang perbedaan pendapat antara guru dengan peserta didik, dan atau antara peserta didik lainnya dalam sistem pendidikan Islam, sehingga proses pembelajarannya bersifat indoktrinatif; dan (2) fokus pendidikannya hanya pada pencapaian kemampuan ritual dan keyakinan tauhid, dengan materi ajar pendidikan Islam yang bersifat tunggal, yaitu benar-salah dan

tentang Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, *Membangun Kembali Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika: Menuju Masyarakat Multikultural*, 16-19 Juli 2002, di Universitas Udayana, Denpasar, Bali.

³ Pada Juni 2003, *Jurnal Antropologi Indonesia* menyelenggarakan workshop regional dengan tema: *Multicultural Education in Southeast Asian Nation: Sharing Experience*.

⁴ Untuk mewacanakan pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia, Media Indonesia menerbitkan edisi khusus tentang *Media Indonesia, Edisi Akhir Tahun 2002: Satu Indonesia*. Edisi ini menampilkan tulisan-tulisan khusus tentang berbagai aspek seperti pendidikan, sosial, hukum, politik, dan ekonomi dalam kerangka kesatuan Indonesia.

⁵ Lihat M. Amin Abdullah, "Pengajaran kalam dan Teologi di Era Kemajemukan: Sebuah Tinjauan Materi dan Metode Pendidikan Agama" dalam *Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, Edisi No. 11 Tahun 2001, hlm. 14.

baik-buruk yang mekanistik⁶. Di pihak lain, Mas'ud menyebutkan tiga indikator proses pendidikan Islam yang eksklusif, dogmatik, dan kurang menyentuh aspek moralitas. Ketiga indikator tersebut adalah: (1) guru lebih sering menasehati peserta didik dengan cara mengancam, (2) guru hanya mengejar standar nilai akademik sehingga kurang memperhatikan budi pekerti dan moralitas anak, serta (3) kecerdasan intelektual peserta didik tidak diimbangi dengan kepekaan sosial dan ketajaman spiritualitas beragama⁷.

Kondisi pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islamnya, seperti yang digambarkan di atas, menurut para pakar pendidikan Indonesia tidak memadai lagi untuk masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka perlu dilakukan transformasi paradigma pendidikan di Indonesia. Adapun paradigma pendidikan yang ditawarkan adalah paradigma pendidikan multikultural sebagai pengganti paradigma pendidikan yang monokultural.

Mengaitkan paradigma pendidikan multikultural dengan pesantren sangat relevan, karena eksistensi pesantren secara makro diharapkan dapat berperan aktif dan memberi kontribusi yang berbobot dalam *social engeneering* (rekayasa sosial) dan transformasi sosiokultur.

Atas dasar pemikiran di atas, peneliti tertarik untuk melakukan riset di pesanten dalam kaitannya dengan paradigma pendidikan multikultural. Ada tiga pertanyaan utama yang menjadi fokus studi ini. *Pertama*, bagaimana proses historis sedemikian hingga Dar al-Tauhid kini dikenal sebagai Ponpes yang sangat kental dengan ciri khas mengibarkan bendera

⁶ Lihat Abdul Munir Mulkhan, "Humanisasi Pendidikan Islam" dalam *Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, Edisi No. 11 Tahun 2001, hlm. 17-18. Bandingkan dengan Muhammad Ali, "Pendidikan Prulalis-Multikuralis" dalam *Harian Kompas*, Edisi 26 April 2002, dan Ahmad Fuad Fanani, "Pendidikan Pluralis-Multikultural dan Liberatif" dalam *Harian Kompas*, Edisi 3 Juli 2002.

⁷ Lihat Abdurrahman Mas'ud, "Format Baru Pola Pendidikan Keagamaan pada Masyarakat Multikultural dalam Perspektif Sisdiknas" dalam Mu'amar Ramadhan dan Hesti Radinah (ed.), *Antologi Studi Agama dan Pendidikan* (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2004) hlm 87-88.

multikulturalisme; *Kedua*, Bagaimana Dar al-Tauhid mempraktikkan nilai-nilai multikulturalisme, baik dalam konteks pendidikan formal dan pendidikan non-formalnya; dan *ketiga*, Apakah Dar al-Tauhid dapat disebut sebagai Ponpes yang telah berhasil dalam mengusung nilai-nilai multikultural.

B. TERMINOLOGI

1. Pendidikan Multikultural

Membicarakan terminologi tentang pendidikan multikultural menurut sangat menarik dimulai dengan dua macam pertanyaan yang sepertinya serupa namun hakekatnya bermakna dan berimplikasi berbeda. Dua pertanyaan itu adalah, pertama, "*Dengan kondisi peserta didik yang multikultural, bagaimana cara mengajarnya?*", dan pertanyaan kedua, "*Bagaimana cara mengajarkan pada peserta didik agar kelak mereka mempunyai karakter multikultural?*"

Dua jenis pertanyaan itu setidaknya menunjukkan perbedaan dalam dua hal: *urgensi* dan *orientasi*. Dalam hal *urgensi*, pertanyaan jenis pertama mengisyaratkan bahwa pendidikan multikultural hanya perlu jika kondisi peserta didiknya berasal dari latarbelakang kultur yang beragam; sedangkan pertanyaan jenis kedua tidak demikian, pendidikan multikultural diperlukan untuk semua kondisi. Demikian juga dalam hal *orientasi*, pertanyaan jenis pertama mengisyaratkan bahwa pendidikan multikultural bertujuan agar proses pendidikan tidak diganggu oleh realitas keberagaman latar belakang kultur peserta didiknya; sementara pertanyaan jenis kedua tidak bermakna demikian, proses pendidikan harus melahirkan insan yang mempunyai karakter multikultural, sehingga kemudian mampu hidup rukun dan saling menghormati dalam realitas masyarakat multikultural.

Banyak dijumpai dalam literatur, definisi tentang pendidikan multikultural yang esensinya adalah sebagaimana pertanyaan jenis pertama di atas. Beberapa contoh diantaranya adalah definisi yang dikemukakan beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Definisi menurut James A. Banks, bahwa,

pendidikan multikultural adalah konsep pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik tanpa memandang gender dan kelas sosial, etnik, ras, agama, dan karakteristik kultural mereka untuk belajar didalam kelas⁸;

2. Definisi menurut Fredrick J. Baker, bahwa pendidikan multikultural adalah gerakan reformasi yang didisain untuk mengubah lingkungan pendidikan secara menyeluruh sehingga peserta didik yang berasal dari kelompok ras dan etnik yang beragam memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan di sekolah, perguruan tinggi, dan universitas⁹;

3. Definisi menurut Francisco Hidalgo, bahwa pendidikan multikultural adalah pembelajaran yang bebas dari rasisme, seksisme, serta bentuk-bentuk dominasi sosial dan intoleran lainnya¹⁰; dan masih banyak lagi definisi serupa.

Sementara dalam penelitian ini, digunakan definisi yang esensinya adalah sebagaimana pertanyaan jenis kedua, dengan mengikuti definisi yang dikemukakan oleh Ruriko Okada dan Keith Wilson. Menurut Okada, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang membantu para peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mengenal, menerima, menghargai, dan merayakan keragaman kultural¹¹. Definisi ini dipilih karena sejalan dengan tujuan kajian dalam penelitian ini, yaitu bagaimana ponpes Dar al-Tauhid sebagai lembaga pendidikan Islam menciptakan kehidupan sosial yang rukun dan damai di tengah masyarakat dengan beragam kultur.

⁸ James A. Banks & Cherry A. McGee Banks, *Multicultural Education: Issues and Perspectives* (Boston: Allyn and Bacon, 1989), hal 2.

⁹ Lihat Fredrick J. Baker, *Multicultural Versus Global Education: Why Not Two Sides of the Same Coin?* dalam <http://www.csupomona.edu/~jis/1999/baker.pdf>, hlm. 97-98.

¹⁰ Lihat Francisco Hidalgo, "Multicultural Education Landscape for Reform in the Twenty-first Century", dalam [http://education.nmsu.edu/faculty/ci/ruchavez/publication/8_MULTICULTURAL % 20 EDUCATION.pdf](http://education.nmsu.edu/faculty/ci/ruchavez/publication/8_MULTICULTURAL%20EDUCATION.pdf), hlm. 1.

2. Ukuran Keberhasilan Pendidikan Multikultural

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pendidikan multikultural yang dipraktikkan, maka sangat tepat jika mengacu pada *karakteristik insan yang berkarakter multikultural*, baik sebagai individu maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pendidikan multikultural dikatakan berhasil jika proses pendidikan tersebut melahirkan insan-insan yang berkarakter multikultural; insan dikatakan berkarakter multikultural jika ia menganal, menghargai, dan merayakan realitas keberagaman kultur; selanjutnya jika insan-insan yang saling mengenal, saling menghargai, dan saling merayakan keberagaman kultur tersebut hidup bersama maka idealnya tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Dengan demikian, indikator keberhasilan dari sebuah pendidikan multikultural adalah kerukunan dan kedamaian.

C. LANDASAN TEORI

1. Pendidikan Karakter: dari mana memulainya?

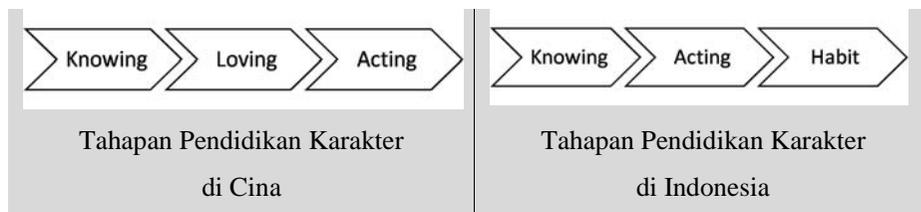
Ratna Megawangi, dalam bukunya, *Semua Berakar Pada Karakter mencontohkan*, mencontohkan bagaimana kesuksesan Cina dalam menerapkan pendidikan karakter sejak awal tahun 1980-an. Menurutnya, pendidikan karakter adalah untuk mengukir akhlak melalui proses *knowing the good, loving the good, and acting the good*. Yakni, suatu proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan fisik, sehingga akhlak mulia bisa terukir menjadi habit of the mind, heart, and hands¹².

Implementasi pendidikan karakter di Indonesia tidak jauh dari konsep yang diterapkan di Cina tersebut. Menurut Kemendiknas, pendidikan karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan (*knowing*), pelaksanaan (*acting*), dan kebiasaan

¹¹ Lihat Ruriko Okada, Multikultural Education in Japan: "What Can Japan Learn from Multicultural Australia?", dalam <http://themargins.net/fps/student/okada.html>, hlm 1.

¹² Ratna Megawangi, *Semua Berakar Pada Karakter* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2007).

(*habit*)¹³. Secara visual, model tahapan pembentukan karakter di Cina dan di Indonesia adalah sebagai berikut.



Dalam praktiknya, pendidikan karakter di Indonesia secara umum belum dapat dikatakan berhasil. Masih banyak lembaga pendidikan yang hanya menyentuh aspek pengetahuan semata. Padahal, pendidikan karakter tidak hanya membutuhkan teori atau konsep semata. Selama ini sudah cukup banyak teori tentang kepribadian, akhlak, budi pekerti, karakter, yang telah dirumuskan dan diurai jelas dalam berbagai artikel, buku, dan banyak hasil penelitian. Menurut Suswandi¹⁴, pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah lebih tepat melalui pendekatan modeling, keteladanan (*uswah*) yang dilakukan oleh guru. Karena karakter merupakan perilaku (*behaviour*), bukan pengetahuan sehingga untuk dapat diinternalisasi oleh peserta didik, maka harus diteladankan bukan diajarkan. Jadi dalam mendidik karakter sangat dibutuhkan sosok yang menjadi model. Model yang dapat ditemukan oleh peserta didik di lingkungan sekitarnya. Peserta didik butuh contoh nyata, bukan hanya contoh yang tertulis dalam buku apalagi contoh khayalan.

Oleh karena itulah, penelitian ini didasarkan pada kerangka teori belajar sosial (*Social Learning Theory*) yang dikemukakan oleh Bandura. Dalam teori ini dinyatakan bahwa seorang individu mempelajari suatu perilaku melalui proses observasi terhadap perilaku orang lain. Dinyatakan bahwa model belajar modeling atau keteladanan merupakan cara yang efektif dalam mengubah

¹³ Kemendiknas Tahun 2010-2014, Panduan Pembinaan Pendidikan Karakter di SMK (Jakarta: Renstra Direktorat 2011) hlm. 56.

¹⁴ Sebagaimana dikutip Wahid, A., (2009). Budi Pekerti Harus Diteladankan, Bukan Diajarkan. <http://tribunjabar.co.id>.

perilaku seseorang, lebih dari sekedar ceramah atau perintah. Bandura menekankan pentingnya keberadaan model panutan (*role model*) dalam pengembangan karakter.

D. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Potret Pondok Pesantren Dar al-Tauhid

Pondok Pesantren Dar al-Tauhid, tepatnya terletak di Jalan K.H. A. Syathori Nomor 10-12 Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. Pondok Pesantren Dar al-Tauhid didirikan oleh K.H. Sanawi bin Abdullah bin Muhammad Salabi yang selanjutnya diteruskan oleh putranya, K.H. A. Syathori. Tanggal, bulan, dan tahun didirikannya tidak tercatat. Akan tetapi, pesantren ini diperkirakan didirikan pada awal abad XX, dikarenakan bertepatan dengan K.H. A. Syathori, putra K.H. Sanawi bin Abdullah, pulang dari menuntut ilmu keislaman dan diteruskan memimpin pesantren, yaitu pada tahun 1932.

Dalam hal akademi pesantren, latar belakang pendidikan K.H. A Syathori sangat beragam. Beberapa pesantren yang pernah dijadikan tempat belajar *ngaji* ilmu agama Islam adalah Pesantren Kuningan pada K.H. Shobari, Pesantren Babakan Ciwaringin pada K. Ismail bin Adzra bin Nawawi dan K. Dawud, Pesantren Asmoro Majalengka pada K.H. Abdul Halim, Pesantren Jamsaren Solo pada K.H. Idris, dan terakhir di Pesantren Tebuireng Jombang pada K.H. Hasyim Asyari (pendiri NU).

Keragaman pendidikan pesantren ini ternyata menjadi dasar bagi K.H. A. Syathor untuk melakukan perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan pesantren yang menjadi amanah K.H. Sanawi bin Abdullah. Dalam sistem pendidikan pesantren, K.H. A Syathori menggunakan metode yang sudah populer di kalangan pesantren, yaitu *halaqoh* atau yang dikenal dengan *bandongan* dan *sorogan*. Di samping itu juga mengenalkan sistem madrasah (klasikal).

Proses pendidikan pesantren dilakukan dengan penjenjangan pembelajaran dengan menggunakan sebutan *sifir awal* (nol pertama), *sifir tsani* (nol kedua), dan *sifir tsalits* (nol tiga). Tiap *sifir*

mempunyai tiga jenjang A,B, dan C sehingga semuanya berjumlah sembilan jenjang. Sebutan ini pada perkembangan selanjutnya dikenal dengan istilah *Ibtidaiyah* (enam tahun), dan *Tsanawiyah* (tiga tahun).

Dalam kepemimpinannya, K.H. A. Syathori juga melakukan pengembangan dan pembaruan, baik fisik maupun akademik pesantren. Pertama kali didirikanlah Madrasah Wathaniyah yang bisa berarti sekolah nasional atau sekolah lokal. Disebut demikian dikarenakan pembantu atau pengajar pada waktu itu sepenuhnya dari daerah lokal (*abna al-wathan*) sekitar pesantren. Atau, sebutan semacam itu bisa juga merujuk dalam rangka untuk mengenang perjuangan kebangsaan (*wathaniyah*) yang dikobarkan K.H. Hasyim Asyari bersama ulama-ulama lain, termasuk K.H. A Syathori.

K.H. A Syathori juga melakukan renovasi bangunan fisik pesantren yang semula hanya satu dua kompleks, kemudian berkembang menjadi delapan kompleks. Yang menarik dan unik nama-nama kompleks pesantren menggunakan abjad Latin A, B, C, D, E, F, G, dan H, dan tidak menggunakan nama atau abjad Arab. Dibangun pula mushala di tempat yang lebih luas, sedangkan mushala lama dijadikan kompleks asrama dengan nama kompleks H.

Jadi, termasuk salah satu pemikiran dan praktik modern K.H. A Syathori adalah beliau mendirikan pengajaran dengan sistem *madrasi*. Ada suatu peristiwa yang sangat menarik dan pantas dicatat, ketika K.H. A. Syathori mengenalkan sistem *madrasi* dengan menggunakan ruangan, kapur, dan papan tulis. Peristiwa itu adalah beberapa tokoh masyarakat sempat protes karena ayat-ayat Al-Qur'an dan teks-teks Hadits ditulis dengan kapur yang kemudian dihapus dan debuanya beterbangan ke lantai. Kejadian ini oleh sementara tokoh-tokoh masyarakat dianggap merupakan bentuk penghinaan kepada Al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi, K.H. A. Syathori berhasil meyakinkan mereka bahwa pendidikan adalah cara terbaik untuk mengagungkan Al-Qur'an dan meresapkan ayat-ayatnya pada hati murid-murid, sedangkan yang beterbangan adalah debu-debu kapur belaka. Mungkin karena kekuatan argumentasi atau mungkin karena ketokohnya, akhirnya mereka dapat menerima pendapatnya.

Tatkala K.H. A. Syathori wafat pada 19 Februari 1969, umur putra beliau yang kelak menjadi pengganti, K.H. Ibnu Ubaidillah, baru berusia 20 tahun dan sedang melakukan proses belajar. Oleh karena itu, untuk sementara waktu pengelolaan Pesantren Dar al-Tuhid dipegang bersama-sama oleh para anak menantu, yaitu K.H. A. Badlawi, K.H. Muhammad Asyrafuddin, dan K.H. Mahfudz Thaha, Lc.

K.H. Ibnu Ubaidillah sendiri lahir di Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat pada 10 Mei 1949. Sebelum diserahi tugas untuk menggantikan ayahnya, K.H. Ibnu Ubaidillah *nyantri* ke berbagai pesantren sebelum akhirnya menemukan pesantren yang sesuai dengan keinginannya, yaitu Pesantren K.H. Muslih di Tanggir Tuban, Jawa Timur. Selama enam tahun beliau belajar di pesantren ini, dan kemudian melanjutkan belajar ke Makkah al-Mukarramah dalam asuhan Syekh Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki selama dua tahun.

Setelah kembali ke tanah air pada tahun 1982, K.H. Ibnu Ubaidillah memegang pimpinan pesantren dibantu oleh kakak-kakak ipar dan keponakannya, yaitu Dr. K.H. Khozin Nasuha, K.H. Husein Muhammad, K.H. A. Zaeni Dahlan, K.H. Hasan Thuba, Dr K.H. Ahsin Sakho, Kiai Luthfillah Baidlawi, dan K.H. Mahsun Muhammad, MA. Ketika beberapa pengasuh sudah pulang ke Rahmatullah dan beberapa yang lain menetap di luar daerah, seperti K.H. Hasan Thuba menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tanggir Tuban, K.H. A. Zaeni Dahlan menetap di Bandung, dan Kiai Luthfillah Baidlawi menjadi pengasuh Pondok Pesantren Dar Al-Qur'an Batanghari Jambi, maka dewan Pengasuh Pesantren di pegang oleh empat orang, yaitu Drs. K.H. Husein Muhammad, Dr. K.H. Ahsin Sakho, Prof. Dr. K.H. Khozin Nasuha, K.H. Mahsun Muhammad, MA., dan ditambah Dr. K.H. Marzuki Wahid, dengan pimpinan (*Syaikh Al Ma'had*) tetap dipegang oleh K.H. Ibnu Ubaidillah Syathori. Jadi, dalam struktur kepengasuhan dapat dikatakan bahwa K.H. Ibnu Ubaidillah Syathori adalah sebagai pengasuh pokok, sementara lima yang lainnya sering disebut dengan Dewan Pengasuh.

Pada masa kepemimpinannya, K.H. Ibnu Ubadillah juga melakukan renovasi bangunan fisik pesantren. Pada awalnya

pesantren ini dikenal dengan sebutan al-Mahad al-Islami, kemudian K.H. Ibnu Ubaidillah mengganti namanya menjadi Mahad Dar al-Tauhid al-Alawi al-Islami, dan terakhir disederhanakan menjadi Mahad Dar al-Tauhid al-Islami. Beliau juga melakukan beberapa perubahan dan perkembangan dalam sistem pendidikan pesantren. Berbagai lembaga-lembaga lain non-pendidikan, juga tumbuh subur melengkapi detak kehidupan santri-santri di pesantren.

Untuk fasilitas pesantren berupa gedung sekolah dan asrama santri oleh K.H. Ibnu Ubaidillah diganti nama-namanya yang semula menggunakan abjad latin menjadi nama Badar, Uhud, Hudaibiyah, dan Khandak (asrama santri putra), sedangkan asrama santri putri gedung lama bernama Ummu Kaltsum dan gedung baru Fathimah al-Zahra (lambang keteguhan, kepatuhan, kemandirian, dan kesabaran).

2. Realitas Multikultural Arjawinangun

Tidak ada catatan pasti kapan Arjawinangun mulai ramai dihuni. Konon pada tahun 1917-an di zaman Belanda kawasan itu adalah kompleks pabrik gula. Pondok Dar Al-Tauhid yang didirikan KH. Syathori, ditengarai bekas sentral pabrik gula dan perkebunan tebu. Diturunkan oleh Ubaidillah atau Kang Ubed¹⁵, pada zaman Belanda, seputar pabrik hanya ramai oleh aktifitas buruh pabrik. Sebagian besar mereka berasal dari Jamblang dan berbagai daerah lain sekitar Cirebon. Kawasan pabrik mulai jadi pemukiman ketika para buruh menetap. Waktu itu, kawasan blok Depok awal mula dihuni.

Dari asal mulanya itu, tidak salah kiranya jika Arjawinangun digolongkan sebagai daerah Urban. Sebab menurut Kang Ubed, tidak ada warga yang betul-betul asli pribumi. Hampir seluruh warga pendatang. Karena itu hingga kini masyarakat di sekitar Arjawinangun tidak mengenal nenek moyang (Ki Buyutnya) masing-masing. Dalam perjalanannya, keberadaan pabrik telah memicu lahirnya pasar tradisional. Potensi ekonomi itu menyedot lebih banyak lagi orang-orang luar masuk. “biarpun kemudian pabrik ditutup, Arjawinangun tetap bergairah sebagai sentral

ekonomi apalagi jumlah penduduknya yang terus bertambah,” jelas Kang Ubed.

Pesona Arjawinangun sebagai sumber ekonomi yang cukup menjanjikan diduga kuat pula menjadi daya tarik bagi etnis Tionghoa berinvestasi. Sepanjang jalan kawasan pasar, ruko-ruko didirikan, dan hingga kini kawasan itu menjadi sentral pasar Arjawinangun-Junjang. Aktivitas bisnis Tionghoa telah memicu laju ekonomi bergerak lebih cepat. Umumnya Tionghoa sebagai pemilik grosir bahan-bahan kebutuhan pokok, sedangkan pribumi pedagang eceran. Selama bertahun-tahun, hubungan dagang itu telah membentuk pola relasi sosial antara warga dan etnis Tionghoa lebih terbuka, toleran, dan dinamis.

Arjawinangun mulai ramai sekitar th 1980-an ketika para pelancong dari kota-kota Solo, Klaten, dan Sukoharjo mulai masuk. Sebelumnya suku Sunda lebih dulu berbaur, dan baru etnis Batak muncul belakangan. Kusnan¹⁶, ketua Paguyuban Rantau Bersatu (PRB) salah satu organisasi perkumpulan perantau dari Jawa (Jawa Tengah-Jawa Timur) di Arjawinangun, memperkirakan ada 30 KK orang Jawa yang menetap dan menjadi anggota PRB. Di luar itu, kata Kusnan, terdapat lebih dari 100 KK. Orang-orang Jawa tinggal menyebar dan tidak ngeblok di satu wilayah. Mereka hidup berbaur dengan warga. Profesi mereka bermacam-macam mulai dari dagang baso, es, jamu, rokok, sampai Pegawai Pemerintahan atau Swasta, juga ada yang menjadi TNI.

Dibandingkan dengan orang Jawa, populasi Tionghoa di Arjawinangun lebih banyak, mencapai 150 KK. Hok¹⁷, tokoh Tionghoa setempat menyebutkan bahwa pertumbuhan komunitas Tionghoa dalam pengamatannya relatif stabil. Hampir tidak ada kenaikan yang signifikan, hal ini karena daerah penyebarannya terus meluas. Semula di seputar pasar, kini pemukiman Tionghoa tersebar di beberapa titik lain. Menurut Hok, profesi komunitasnya sejak dulu menggeluti bisnis dagang. Hal itu dikarenakan kebijakan

¹⁵ Sebagaimana dimuat dalam BLAKASUTA Edisi 13 Tahun 2008 hlm 5.

¹⁶ Ibid hlm 6.

¹⁷ Ibid hlm 6.

pemerintah Orde Baru yang menutup profesi lain bagi Tionghoa. Kondisi mulai berubah pasca reformasi bergulir, di mana peluang bagi Tionghoa terbuka masuk ke ranah mana pun. Sebagian Tionghoa mulai meninggalkan dagang sebagai profesi turun temurun dari leluhurnya. Mereka memilih bidang lain seperti perkantoran, pemerintahan, kedokteran, dan lain-lain.

Lebih jauh Kang Ubed menuturkan bahwa, “Tradisi bisnis dan perdagangan di Arjawinangun, selain karena peran Tionghoa, juga karena mengikuti jejak orang-orang Pekalongan”. Istilahnya “ngeber”, yakni cara berjualan dengan menjajakan pakaian berkeliling dari kampung ke kampung. Banyak diantara para pemilik modal besar kemudian memilih menetap di Tegalbug. Salah satu daerah yang hingga kini dikenal sebagai sentral komoditi sandang murah terbesar di Jawa.

Selain etnis Jawa dan Tionghoa, Arjawinangun menarik pula bagi etnis Batak untuk datang dan menjalankan bisnisnya. Meski jumlahnya lebih sedikit, di Arjawinangun orang-orang Batak tinggal berkelompok di kawasan Perumnas. Mereka diperkirakan pertama kali masuk Th. 1990-an.

3. Praktik Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren Dar al-Tauhid

Di Pesantren Dar al-Tauhid, pendidikan dalam rangka untuk membentuk insan berkarakter multikultural dapat terlihat dari aktifitas kajian yang sengaja diprogramkan. Adanya Forum Musyawarah Qubra dan Bahtsul Masail, misalnya, adalah bentuk pembelajaran yang akan mengasah santri peka terhadap perbedaan dan belajar bagaimana menyikapinya. Musyawarah Qubra adalah forum yang diikuti semua santri Dar al-Tauhid untuk membahas berbagai fenomena sosial yang muncul yang selanjutnya mencoba dilihat dalam perspektif Islam. Forum ini diadakan dalam satu bulan dua kali, yang terkadang mendatangkan nara sumber dari luar pesantren. Dituturkan, Gus Mus panggilan akrab K.H. Mustafa Bisri pernah diundang sebagai nara sumber dalam forum ini.

Forum Bahtsul Masail adalah ajang santri untuk berpendapat

dalam menyikapi permasalahan sosial dan mencari kesimpulan hukumnya dalam Islam. Tentu dalam Forum Bahtsul Masail santri secara tidak langsung belajar berbeda dan harus menghargai perbedaan itu. Posisi Pondok Pesantren Dar al-Tauhid yang berdekatan dengan Greja dan Wihara menarik juga untuk dipaparkan. Pada kenyataannya, santri ternyata bisa berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda akidah. Bahkan, dalam acara-acara ritual mereka dapat lebur sekedar meramaikan. Misalnya, pada peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, selain tampil bentuk kesenia seperti *hadraoh* dan kosidah juga ditampilkan Barong Sai dari masyarakat Tionghoa. Hal ini ditegaskan sendiri oleh pandangan pengasuh pesantren ini, K.H. Ibnu Ubaidillah, bahwa bagian dari pola pikir humanisme, kalangan pesantren tidak menghalangi pergaulan dengan kelompok-kelompok lain walaupun berbeda agama. Selain itu, dengan keberadaan santri yang datang dari berbagai daerah, dituturkan misalnya, dari Medan, Jambi, Palembang, Lampung, NTT, Indramayu, Brebes, dan lainnya adalah corak tersendiri dalam perbedaan. Mereka akan saling belajar memahami budaya yang berbeda dan bagaimana cara hidup bersama dalam perbedaan.

Praktik kehidupan multikultural juga terlihat dari interaksi sosial kemasyarakatan antar etnis dan agama di Arjawinangun. Seperti diceritakan, misalnya Babah Liem (kakek Hok) dikenal dekat dengan warga dan KH. Syathori. Ia sering berkunjung ke pesantren dan memberikan makanan kepada santri. Kyai pun mengajarnya berbagai do'a penyembuhan dari Al-Qur'an dan Hadits, tanpa memaksanya untuk memeluk agama Islam. Ilmu penyembuhan itu kini diturunkan ke anak cucunya. Dengan begitu Perbedaan etnis dan agama bukan kendala dalam menjalin hubungan sosial. "Saya merasa asli orang sini, hampir seluruh teman saya pun asli Arjawinangun dan Junjang" tambah Hok. Soal kesenjangan ekonomi antara Tionghoa dan pribumi, Hok tidak memungkirinya itu bisa menyulut konflik. Tetapi hal itu baginya tidak masalah sebab antara warga dan Etnis Tionghoa di Arjawinangun sejak lama dalam relasi ekonomi satu sama lain sudah saling membutuhkan.

Kalaupun ada isu-isu etnis yang menyulut konflik, hal itu

kata Kang Ubed, seringkali hanya merupakan imbas dari isu nasional. Ini dibenarkan oleh Hok, bahwa tidak ada isu-isu lokal terkait langsung dengan keberadaan Tionghoa di Arjawinangun yang bernuansa konflik. Tidak berbeda dengan Tionghoa, etnis Jawa pun mampu menyesuaikan diri. Kusnan, yang hampir 27 tahun tinggal di Arjawinangun menyatakan bahwa; “Dalam pergaulan sehari-hari orang-orang Jawa tidak menghadapi kendala. Apalagi kultur atau “unggah-ungguh” orang Jawa dan orang Cirebon punya banyak kesamaan.

Bahkan dari kalangan etnis Jawa banyak dipercaya peran-peran penting di lingkungan tinggalnya, seperti ketua RT, RW, dan pengelola Mushola”. Karakter masyarakat urban dengan beragam etnis itu, tidak menyebabkan kehidupan sosial Arjawinangun terkotak-kotak. Pergaulan antar etnis berjalan cair dan dinamis. Tidak ada sekat sekat pemisah yang membatasi hubungan sosial mereka. Dalam hal pendidikan misalnya; siapapun baik Jawa, Sunda, Batak, dan Tionghoa boleh bersekolah di SD dan SMP yang sama. Tidak ada sekolah khusus etnis tertentu. Dalam ekspresi kebudayaan, warga Tionghoa bebas memunculkan tradisi-tradisi mereka dalam moment-moment peringatan keagamaan. Kebiasaan berbaur dan bergaul sejak kecil mulai dari pendidikan, budaya, maupun sosial menyebabkan kesan eksklusif dari etnis Tionghoa relatif tidak muncul sama sekali.

Di wilayah sosial, peran-peran komunitas Tionghoa tidak dibatasi. Bahkan tergolong menonjol. Mereka aktif terlibat di setiap kegiatan sosial seperti pengobatan gratis, pembukaan posko bencana, dan pembagian sembako bagi masyarakat miskin. Aktivitas sosial mereka betul-betul dilandasi misi kemanusiaan, bukan misi keagamaan. Sementara, ketika pesantren atau para tokoh Kyai menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan, komunitas Tionghoa tak ketinggalan ikut berpartisipasi. Peran sosial etnis Tionghoa diakui Kyai Ma'mun Saad cukup baik. Salah seorang tokoh pesantren itu mengaku dirinya seringkali bekerjasama dengan kalangan Tionghoa dalam aktivitas sosial dan agama. “Mereka baik, respek pada kegiatan agama dan sosial kita” katanya.

Begitupun ketika hajatan sunatan dan kawinan warga, Etnis Tionghoa umumnya mau hadir jika diundang. Bagi Kyai Ma'mun

Saad sikap Tionghoa seperti itu tidaklah aneh, sebab perilaku saling menghormati itu telah ada sejak dulu, sejak masa hidupnya Babah Leim. "Babah Leim itu bukan muslim, tetapi sangat respek terhadap kegiatan agama Islam dan acara sosial kemasyarakatan" kata Kyai Ma'mun.

Beberapa contoh interaksi di atas adalah praktik nyata bentuk keteladanan yang dilakukan oleh tokoh atau pemuka antar etnis dan agama, yang mudah diikuti oleh para pengikut atau penganutnya. Sangat dimungkinkan, bahwa praktik kehidupan multikultural seperti demikian lebih efektif daripada sekadar melalui kajian-kajian yang baru sebatas pengetahuan dan pemahaman.

4. Potensi Konflik

Sekalipun hingga kini (2012) tidak pernah terjadi konflik serius dalam komunitas plural Arjawinangun, namun potensi meletusnya konflik pasti ada. Ibarat bom waktu, konflik di komunitas plural kapanpun siap meledak. Namun itupun sangat tergantung dari pola relasi sosial dan komunikasi antar etnis dan komunitas agama yang ada.

Memang riak-riak kecil sempat muncul dan menimbulkan pergesekan, tetapi tidak sampai meletus hebat. Hal itu tidak dipungkiri oleh Kang Ubed¹⁸, menurutnya konflik Tionghoa dan pribumi beberapa kali pernah terjadi. Perselisihan bermula dari kasus kriminal biasa. Situasi makin panas, ketika persoalan ditarik-tarik ke wilayah SARA (suku, ras, dan agama). Untungnya gesekan-gesekan itu tidak pernah berkembang lebih jauh.

Para tokoh dari berbagai elemen masyarakat baik pesantren, gereja, maupun Tionghoa segera mengambil langkah-langkah dialog untuk meredam konflik. Sampai sekarang Arjawinangun aman dan damai. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir tidak pernah muncul kasus-kasus pergesekan yang murni dipicu oleh isu etnis atau agama. Hal itu dikuatkan oleh fakta pada Mei 1998 ketika beberapa wilayah lain bergejolak, Arjawinangun tidak

¹⁸ Ibid hlm 8

terkena imbas. Kerusakan Mei tidak berpengaruh apapun. Kondisi kondusif diakui beberapa tokoh karena para tokoh lintas etnis dan agama selalu berkomunikasi dan melakukan dialog.

E. KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan tiga hal:

Kesimpulan Pertama, Dar al-Tauhid kini dikenal sebagai Ponpes yang sangat kental dengan ciri khas mengibarkan bendera multikulturalisme ditengarai didukung oleh dua hal: pertama, kondisi realitas keragaman etnis dan agama sejak lama ada di Arjawinangun. Kedua, latar belakang pendidikan pendiri dan pengasuh pesantren Dar al-Tauhid yang beragam, bahkan luar negeri, sehingga pengalaman-pengalaman itu yang kemudian mewarnai pemikiran dan cara hidup dalam kebersamaan di tengah keragaman.

Kesimpulan kedua, Dalam rangka untuk membentuk insan berkarakter multikultural, yakni insan yang mengenal, menerima, menghargai dan merayakan keberagaman, Dar al-Tauhid menempuhnya melalui dua hal, yaitu pertama melalui ruang-ruang kajian yang dapat membuka wawasan santri untuk dapat mengenal perbedaan, dan kedua melalui keteladanan dalam bentuk interaksi sosial.

Kesimpulan ketiga, praktik pendidikan multikultural yang dilakukan oleh Dar al-Tauhid baik melalui kajian maupun keteladanan, keduanya dapat dikatakan membuahkan hasil yang memuaskan, ditandai dengan realitas kehidupan sosial yang harmonis, tidak atau belum pernah terjadi konflik serius antar etnis atau agama.

Daftar Pustaka

- Abdullah.M. Amin, "Pengajaran kalam dan Teologi di Era Kemajemukan: Sebuah Tinjauan Materi dan Metode Pendidikan Agama" dalam *Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, Edisi No. 11 Tahun 2001.
- Baker. Fredrick J., *Multicultural Versus Global Education: Why Not Two Sides of the Same Coin?*" dalam <http://www.csupomona.edu/~jis/1999/baker.pdf>.
- Cherry A. James A. Banks &. McGee Banks, *Multicultural Education: Issues and Perspectives* (Boston: Allyn and Bacon, 1989).
- Francisco Hidalgo, "Multicultural Education Landscape for Reform in the Twenty-first Century", dalam http://education.nmsu.edu/faculty/ci/ruchavez/publication/8_MULTICULTURAL%20EDUCATION.pdf.
- Jurnal Antropologi Indonesia, Departemen Antropologi, Universitas Indonesia, mengadakan simposium Internaasional di Makasar dengan mengungkap isu-isu yang berkaitan dengan multikulturalisme. Isu-isu yang dimaksud meliputi: demokrasi, hak-hak asasi manusia, kewarganegaraan, pendidikan, nasionalisme, konflik sosial, problem identitas dan etnisitas, hubungan kekuasaan dengan respon lokal terhadap keragaman, dan lain-lain. Simposium serupa diselenggarakan pada 2001 dan 2002 dengan mengambil tempat di Padang dan Denpasar.
- Mas'ud. Abdurrahman, "Format Baru Pola Pendidikan Keagamaan pada Masyarakat Multikultural dalam Perspektif Sisdiknas" dalam Mu'amar Ramadhan dan Hesti Radinah (ed.), *Antologi Studi Agama dan Pendidikan* (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2004).
- Megawangi. Ratna, *Semua Berakar Pada Karakter* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2007).
- Mulkhan. Abdul Munir, "Humanisasi Pendidikan Islam" dalam

Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Edisi No. 11 Tahun 2001, hlm. 17-18. Bandingkan dengan Muhammad Ali, "Pendidikan Prulalis-Multikuralis" dalam *Harian Kompas*, Edisi 26 April 2002, dan Ahmad Fuad Fanani, "Pendidikan Pluralis-Multikultural dan Liberatif" dalam *Harian Kompas*, Edisi 3 Juli 2002.

Setiawan.M. Nurkholis, "PRIBUMISASI ALQURAN: Tafsir Berwawasan Ke-Indonesiaan" (Kaukaba: 2012), hlm 115.

Simposium Internasional *Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, Membangun Kembali Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika: Menuju Masyarakat Multikultural*, 16-19 Juli 2002, di Universitas Udayana, Denpasar, Bali.

Pada Juni 2003, *Jurnal Antropologi Indonesia* menyelenggarakan workshop regional dengan tema: *Multicultural Educatuon in Shouteast Asian Nation: Sharing Experience*.

Ruriko Okada, *Multikultural Education in Japan: "What Can Japan Learn from Multicultural Australia?"*, dalam <http://themargins.net/fps/student/okada.html>.

Kemendiknas Tahun 2010-1014, *Panduan Pembinaan Pendidikan Karakter di SMK* (Jakarta: Renstra Direktorat 2011).

Wahid, A., (2009). *Budi Pekerti Harus Diteladankan, Bukan Diajarkan*. <http://tribunjabar.co.id>.

BLAKASUTA Edisi 13 Tahun 2008.